

ANALISIS VIDEO
“SUPREMASI HUKUM BAGIAN 2”

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Jumlah SKS : 2
Semester/Kelas : 2/F
Pengampu Mata Kuliah : 1. Roy Kembar Habibi, M.Pd.
2. Drs. Rapani, M.Pd.



Disusun Oleh :

Desmita Maharani (2413053185)

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025

Video "*Supremasi Hukum Bagian 2*" merupakan lanjutan dari pembahasan tentang pentingnya keberadaan hukum dalam kehidupan bernegara. Di dalamnya dijelaskan bahwa supremasi hukum bukan hanya tentang menempatkan hukum sebagai aturan tertinggi, melainkan juga berkaitan erat dengan pelaksanaannya yang adil dan berintegritas. Hukum tidak cukup hanya menjadi dokumen tertulis, namun harus dijadikan sebagai panduan nyata dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Segala kebijakan dan tindakan, baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat, perlu didasarkan pada hukum yang berlaku dan dijalankan secara adil serta konsisten. Hanya dengan cara demikian, hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan sosial.

Untuk memastikan supremasi hukum berjalan sebagaimana mestinya, seluruh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim wajib menjalankan tugas mereka secara jujur, bertanggung jawab, dan profesional. Mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan hukum tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau campur tangan pihak lain. Namun, realitasnya tidak selalu ideal. Masih sering terjadi penyalahgunaan kewenangan, praktik suap, dan intervensi politik yang mencederai netralitas hukum. Jika penegak hukum bersikap tidak adil, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum bisa hilang, dan hukum hanya akan dilihat sebagai alat kekuasaan oleh segelintir pihak.

Menegakkan supremasi hukum bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat hukum semata. Masyarakat pun memiliki peranan penting. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat adalah dengan memiliki kesadaran hukum, yakni memahami hak serta kewajiban sebagai warga negara dan tidak ragu menyuarakan ketidakadilan yang terjadi. Masyarakat yang memahami hukum akan lebih kritis dan aktif melaporkan setiap bentuk pelanggaran hukum di sekelilingnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, pendidikan hukum sejak dini sangat diperlukan, baik melalui institusi pendidikan formal maupun kegiatan penyuluhan dari lembaga terkait.

Supremasi hukum hanya dapat ditegakkan apabila terdapat kerja sama antara lembaga negara, aparat hukum, dan masyarakat sipil. Tanpa kolaborasi yang erat, hukum tidak akan dapat diterapkan secara efektif. Lemahnya penegakan hukum membuka peluang terjadinya ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu, supremasi hukum perlu dijadikan dasar utama dalam pembangunan negara yang demokratis, berkeadilan, dan melindungi seluruh hak warga negaranya.

Video ini menyampaikan bahwa supremasi hukum bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, namun juga mencakup bagaimana hukum itu dijalankan secara adil dan transparan. Ketika hukum ditegakkan dengan benar dan tanpa diskriminasi, maka akan tercipta masyarakat yang aman, tertib, dan makmur.